

**PENGARUH IMPLEMENTASI *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*,
PENGENDALIAN INTERN KAS, ASIMETRI INFORMASI
TERHADAP *FRAUD*
(Studi Pada BUMN Kota Pekanbaru)**

**Oleh :
Oktariani Wefa
Pembimbing : Nurazlina dan Sem Paulus**

Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia
Email : oktariani.wefa@ymail.com

*The Effect Of Implementation of Good Corporate Governance, The Cash Intern
Control, Information Asymmetry On Fraud
(Empirical Study On BUMN Pekanbaru City)*

ABSTRACT

This study examined the effect of the Implementation of Good Corporate Governance, The Internal Control of Cash, The Information Asymmetry of Fraud (Empirical Study On Government BUMN Pekanbaru City). Data that is used in this research is primary data, that was collected by survey techniques by distributing questionnaires to each functionary at BUMN in Pekanbaru. The population is BUMN company in Pekanbaru many as 33 companies. The selection of sample used purposive sampling method. The sample was (total) the respondent of each corporate represented by three respondents, head branch, head division, and accounting staff. A questionnaire distributed to 99 respondents, and successfully reassembled with complete answers are obtained from 66 respondents. The result of the study showed that the implementation of good corporate governance, the internal control of cash, and information asymmetry has significant effect and positively effects cheating of fraud. Determinate Coeffisience show the result that Adjusted R Square value as 0,806. It means that the effect of Implementation of Good Governance, The Cash Intern Control, Information Asymmetry on Fraud as many as 80,6%. While other 19,4 % will be explained by other variable which was not included in the study.

Keywords: Governance, Cash Control, Information Asymmetry, and Fraud

PENDAHULUAN

Dalam lingkup akuntansi, konsep kecurangan (*fraud*) merupakan penyimpangan dari prosedur akuntansi yang seharusnya diterapkan dalam suatu entitas. Kesengajaan atas salah pernyataan terhadap suatu kebenaran atau keadaan yang disembunyikan dari

sebuah fakta material yang dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang merugikan, biasanya merupakan kesalahan namun dalam beberapa kasus (khususnya dilakukan secara disengaja) memungkinkan merupakan suatu kejahatan. Kecurangan melibatkan penyajian yang keliru dari fakta yang

disengaja atau untuk memperoleh informasi yang tidak semestinya dan untuk memperoleh keuntungan keuangan ilegal.

Menurut Sawyer (2006:339), banyak istilah dalam praktik ilegal dan penipuan, diantaranya kecurangan (*Fraud*), kejahatan kerah putih, dan penggelapan.

Kejahatan kerah putih adalah serangkaian tindakan kejahatan yang dilakukan dengan cara-cara nonfisik melalui penyembunyian ataupun penipuan untuk mendapatkan uang ataupun harta benda, untuk menghindari pembayaran atau hilangnya uang atau harta benda, atau untuk mendapatkan keuntungan bisnis atau pribadi.

Kecurangan menurut *Institute of Internal Auditors* (IIA) adalah meliputi serangkaian tindakan-tindakan tidak wajar dan ilegal yang sengaja dilakukan untuk menipu. Sementara penggelapan adalah konversi secara tidak sah untuk kepentingan pribadi, harta benda yang secara sah berada dibawah pengawasan pelaku kejahatan.

Kecurangan sering kali dilakukan oleh sumber daya manusia yang ada dalam suatu perusahaan yang merupakan tindakan yang merugikan perusahaan itu sendiri. Tindakan kecurangan memiliki efek terhadap risiko kerugian keuangan karena perusahaan yang terlibat dalam kecurangan sering mengalami kebangkrutan, *delisting* dari bursa efek, atau melakukan penjualan asset yang material dengan tingkat yang jauh lebih tinggi daripada perusahaan yang tidak terlibat kecurangan, oleh sebab itu perusahaan harus melakukan tindakan preventif untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan dalam hal tersebut.

Menurut Tunggal (2010:231), pencegahan kecurangan dapat dilakukan dengan cara: (1) membangun struktur pengendalian intern yang baik (2) mengefektifkan aktifitas pengendalian (3) meningkatkan kultur organisasi yang dapat dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (4) mengefektifkan fungsi internal audit (5) menciptakan struktur penggajian yang wajar dan pantas (6) mengadakan rotasi dan kewajiban bagi pegawai untuk mengambil hak cuti (7) memberikan sanksi yang tegas kepada mereka yang melakukan kecurangan dan memberikan penghargaan kepada mereka yang berprestasi (8) membuat program bantuan kepada pegawai yang mendapatkan kesulitan baik dalam hal keuangan maupun non keuangan (9) menetapkan kebijakan perusahaan terhadap pemberian-pemberian dari luar harus diinformasikan dan dijelaskan kepada orang-orang yang dianggap perlu agar jelas mana yang hadiah dan mana yang berupa sogokan dan mana yang resmi (10) menyediakan sumber-sumber tertentu dalam rangka mendeteksi kecurangan karena kecurangan sulit ditemukan dalam pemeriksaan yang biasa-biasa saja (11) menyediakan saluran-saluran untuk melaporkan telah terjadinya kecurangan hendaknya diketahui oleh staf agar dapat diproses pada jalur yang benar.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan bentuk usaha korporasi yang didirikan dengan tujuan utama menjalankan fungsi pemerintahan yang merupakan agen bagi pembangunan ekonomi. Dengan melihat tujuan tersebut, agar dapat

mengoptimalkan peran BUMN, pengurusan dan pengawasannya harus dilakukan secara profesional. Kepengurusan BUMN harus didorong lebih transparan, profesional dan efisien melalui pengambilan keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap *stakeholders*.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menimbang bahwa Badan Usaha Milik Negara merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi, Badan Usaha Milik Negara mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pelaksanaan peran Badan Usaha Milik Negara dalam perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat belum optimal, untuk mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Negara, pengurusan dan pengawasannya harus dilakukan secara profesional.

Perhatian dunia usaha terhadap tata kelola perusahaan meningkat sejak Negara-negara di Asia dihantam krisis ekonomi. adanya kasus skandal akuntansi yang terjadi di berbagai Negara besar juga terjadi di Indonesia. Adapun pernyataan dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) mengungkapkan sering menemukan kecurangan dilakukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam hal

perhitungan akuntansi. Perusahaan milik pemerintah diduga membuat laporan seolah-olah laba yang diterima lebih besar dari laba sebenarnya. BPK juga menemukan kecurangan dan pelanggaran hukum yang banyak ditemui pada perbankan BUMN dengan membuat laporan seolah perusahaan mengalami kerugian besar, menunjukkan peran akuntansi publik tidak berjalan dengan baik. Perusahaan perbankan banyak yang kolaps karena banyak melakukan pelanggaran hukum, sedangkan akuntan publik tidak membuka itu. Namun ketika dibuka oleh akuntan publik asing ini terbongkar. Ini semua baru diketahui ketika BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) mengerahkan lembaga akuntan asing. Bisri berharap dengan keterlibatan BPK dalam mengoreksi lembaga akuntan publik, aksi kecurangan oleh BUMN dan akuntan publik dapat dikurangi dan yakin bahwa sekarang akuntan publik akan lebih hati-hati, karena kalau terbukti terjadi kecurangan, BPK akan melaporkan ini dan bisa minta pemerintah untuk mencabut izin usaha dari lembaga akuntan publik tersebut (Liputan6.com).

Tingginya kecurangan pada pelaporan keuangan yang dilakukan perusahaan besar mendorong perusahaan publik untuk mengambil peran proaktif untuk mencegah kecurangan. Strategi ini harus dikembangkan untuk mendorong pencegahan kecurangan, integritas serta efektifitas dan fungsi dari audit.

Salah satu kasus kecurangan yang terjadi adalah kasus PT KAI yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara. Dalam laporan kinerja keuangan tahunan yang diterbitkannya pada tahun 2005, ia

mengumumkan bahwa keuntungan sebesar Rp. 6,90 milyar telah diraihinya. Padahal apabila dicermati sebenarnya ia harus dinyatakan menderita kerugian sebesar Rp. 63 milyar. Kerugian ini terjadi karena PT Kereta Api Indonesia telah tiga tahun tidak dapat menagih pajak pihak ketiga. Tetapi dalam laporan keuangan itu, pajak pihak ketiga dinyatakan sebagai pendapatan. Padahal, berdasarkan standar akuntansi keuangan, ia tidak dapat dikelompokkan dalam bentuk pendapatan atau asset. Dengan demikian, kekeliruan dalam pencatatan transaksi atau perubahan keuangan telah terjadi di sini.

Hal serupa dalam pencatatan transaksi juga terjadi dalam kasus ini, adanya kasus pejabat PT BNI 46 Cabang Pekanbaru atas kasus pencairan kredit yang merugikan negara sebesar Rp 40 Milyar telah menjadi sorotan pada perbankan di Pekanbaru. Jaksa mendakwa, ke tiga pejabat PT BNI 46 Cabang Pekanbaru bersama terdakwa Eron Napitupulu selaku pemohon kredit sebesar Rp 40 Milyar kepada BNI 46 Pekanbaru, telah bersekongkol menyedot uang negara dan nasabah yang dikelola PT BNI 46. Permohonan Eron diloloskan oleh tiga terdakwa yang merupakan pegawai SKC BNI 46 Pekanbaru. Uang sebesar Rp 40 Milyar pun mengalir ke rekening PT BRJ. Padahal, anggaran yang diajukan untuk meminjam, berupa surat-surat tanah kebun kelapa sawit seluas 1.004 hektar, yang belakangan diketahui fiktif dan bermasalah.

Di tengah maraknya pelaksanaan Implementasi *good corporate governance* (GCG) BUMN, Kasus Waskita yang

disebut-sebut sebagai Enron-nya Indonesia menunjukkan bahwa Kementrian Negara BUMN perlu berupaya lebih keras lagi dalam impelmentasi GCG di BUMN. Terbongkarnya kasus ini berawal saat pemeriksaan kembali neraca dalam rangka penerbitan saham perdana tahun lalu. Direktur Utama Waskita yang baru, M. Choliq yang sebelumnya menjabat Direktur Keuangan PT Adhi Karya (Persero) Tbk, menemukan pencatatan yang tak sesuai, yaitu ditemukan kelebihan pencatatan RP 400 miliar. Direksi periode sebelumnya diduga melakukan rekayasa keuangan sejak tahun buku 2004-2008 dengan memasukkan proyeksi multitalun ke depan sebagai pendapat tahun tertentu.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Ratnayani (2014) yang meneliti tentang Pengaruh Pengendalian Intern Kas dan Implementasi *Good Corporate Governance* terhadap *Fraud* (Studi Empiris pada SKPD di Kabupaten Buleleng). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pengendalian intern kas berpengaruh signifikan negatif terhadap *fraud* (2) implementasi *Good Governance* berpengaruh signifikan negatif terhadap *fraud*, dan (3) pengendalian intern kas dan implementasi *good corporate governance* berpengaruh signifikan terhadap *fraud*.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada periode penelitian. Penelitian ini juga memilih sampel yang berbeda dengan penelitian Ratnayani (2014). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan perusahaan BUMN yang ada di Kota Pekanbaru dengan menambahkan

variabel asimetri informasi sebagai variabel independen.

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Apakah implementasi *good corporate governance* berpengaruh terhadap *fraud*? 2) Apakah pengendalian intern kas berpengaruh terhadap *fraud*? 3) Apakah asimetri informasi berpengaruh terhadap *fraud*?

Adapun yang menjadi tujuan dilakukan penelitian ini adalah: 1) Untuk menguji kembali pengaruh implementasi *good corporate governance* terhadap *fraud* 2) Untuk menguji kembali pengaruh pengendalian intern kas terhadap *fraud* 3) Untuk menguji kembali pengaruh asimetri informasi terhadap *fraud*.

TELAAH PUSTAKA

Fraud

Kecurangan (*fraud*) merupakan suatu kesalahan yang dilakukan secara sengaja yang dilakukan untuk tujuan pribadi atau orang lain dimana tindakan tersebut telah menyebabkan kerugian pihak tertentu atau instansi tertentu. Hal ini sesuai dengan pendapat Sukanto (2009), yang menyatakan bahwa kecurangan (*fraud*) merupakan penipuan yang sengaja dilakukan yang menimbulkan kerugian pihak lain dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan dan kelompoknya.

Fraud menurut Karyono (2013:4-5), *Fraud* dapat diistilahkan sebagai kecurangan yang mengandung makna suatu

penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum (*illegal act*), yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu misalnya menipu atau memberikan gambaran keliru (*mislead*) kepada pihak-pihak lain, yang dilakukan oleh orang-orang baik dari dalam maupun dari luar organisasi. Kecurangan di rancang untuk memanfaatkan peluang-peluang secara tidak jujur, yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan pihak lain.

Fraud diukur melalui 2 indikator, yaitu: (1) Kecurangan Laporan Keuangan. (2) Penyalahgunaan Aset.

Implementasi *Good Corporate Governance*

Good corporate governance (GCG) menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) adalah salah satu pilar dari system ekonomi pasar. *Corporate Governance* berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu Negara. Penerapan GCG mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Oleh karena itu diterapkannya GCG oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia sangat penting untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan.

Implementasi *Good Corporate Governance* diukur melalui 5 indikator, yaitu : (1) Keterbukaan (2) Akuntabilitas (3) Pertanggungjawaban (4) Independensi (5) Kewajaran.

Penerapan Pengendalian Intern Kas

Menurut PP No. 8 Tahun 2006 pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keandalan penyajian laporan keuangan. Pengendalian intern merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu. Pengendalian intern merupakan suatu rangkaian tindakan yang menjadi bagian tidak terpisahkan, bukan hanya sebagai tambahan dari infra struktur perusahaan.

Pengendalian intern kas di perusahaan sangat penting dilakukan karena untuk menghindari kecurangan-kecurangan yang berbentuk penggelapan uang atau yang lainnya yang mengakibatkan asset perusahaan berkurang serta perusahaan mengalami kerugian.

Kas menurut pengertian akuntansi adalah alat pertukaran yang dapat diterima untuk pelunasan piutang, dapat diterima sebagai setoran ke bank dengan jumlah sebesar nominalnya, juga simpanandalam bank atau tempat lain yang dapat diambil sewaktu-waktu. dalam prakteknya, kadang kas dikelompokkan menjadi dua yaitu kas kecil dan kas besar. Kas kecil digunakan untuk operasional sehari-hari dan jumlahnya tidak terlalu besar. Biaanya digunakan untuk biaya operasional seperti biaya administrasi, biaya telepon, listrik, dll. Kas besar biasanya digunakan untuk menampung penerimaan piutang, pinjaman bank, pengeluaran untuk membayar utang, pengeluaran untuk membeli aktiva.

Penerapan Pengendalian Intern Kas diukur melalui 5 indikator, yaitu : (1) Lingkungan pengendalian (2) Penetapan Resiko (3) Informasi Komunikasi (4) Aktifitas Pengendalian (5) Pemantauan.

Asimetri Informasi

Keadaan dimana salah satu pihak mempunyai pengetahuan lebih daripada yang lainnya terhadap sesuatu hal disebut *Information Asimetry*. Asimetri informasi adalah situasi di mana terjadi ketidakselarasan informasi antara pihak yang memiliki atau menyediakan informasi dengan pihak yang membutuhkan informasi.

Asimetri Informasi diukur melalui indikator yaitu : (1) Situasi di mana manajemen memiliki informasi yang lebih baik atas *aktivitas* yang menjadi tanggung jawabnya dibanding pihak luar perusahaan (2) Situasi di mana manajemen lebih mengenal hubungan *input-output* dalam bagian yang menjadi tanggungjawabnya dibanding pihak luar perusahaan (3) Situasi di mana manajemen lebih mengetahui *potensi kinerja* yang menjadi tanggung jawabnya dibanding pihak luar perusahaan (4) Situasi di mana manajemen lebih mengenal *teknis pekerjaan* yang menjadi tanggung jawabnya dibanding pihak luar perusahaan (5) Situasi di mana manajemen lebih mengetahui *pengaruh faktor eksternal* dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya dibanding pihak luar perusahaan (6) Situasi dimana manajemen lebih mengerti apa yang dapat dicapai dalam bidang yang menjadi tanggung jawab dibanding pihak luar perusahaan (7) Situasi

dimana manajemen pertimbangan moral dan profesi dibanding pihak luar perusahaan.

Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis

Hubungan Implementasi *Good Corporate Governance* dengan *Fraud*

Penerapan *good corporate governance* yang berjalan dengan baik dapat meningkatkan nilai (*valuation*) perusahaan dengan cara meningkatkan kinerja keuangan mereka, mengurangi resiko yang mungkin dilakukan oleh pihak intern dengan keputusan-keputusan yang menguntungkan diri sendiri, dan meningkatkan kepercayaan investor. Penerapan *Good Corporate Governance* berdampak pada fokusnya pengelolaan perusahaan dalam pembagian tugas, tanggung jawab, dan pengawasan yang lebih jelas. Penerapan *Good Corporate Governance* yang berjalan dengan baik akan menciptakan laporan keuangan yang berkualitas yang jauh dari praktik kecurangan. Hal tersebut sejalan bahwa penerapan *Good Governance* pada perusahaan khususnya BUMN, Fitriatil Husna (2008). Semakin baik Implementasi *Good Corporate Governance* maka *Fraud* atau tindakan kecurangan suatu perusahaan juga semakin rendah.

Hasil penelitian yang mendukung tentang pengaruh Implementasi *Good Corporate* terhadap *Fraud* dilakukan oleh Ratnayani (2014) yang berhasil membuktikan bahwa implementasi *good corporate governance* berpengaruh signifikan negatif terhadap *fraud*.

Hubungan Penerapan Pengendalian Intern Kas dengan *Fraud*

Sistem pengendalian intern yang baik memiliki pengaruh yang besar terhadap kelangsungan perusahaan, karena itu perusahaan dapat melaksanakan seluruh aktifitasnya sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, jika tujuan perusahaan telah tercapai berarti tindakan yang dilakukan manajemen telah sesuai dengan peraturan dan tidak ada tindakan yang merugikan perusahaan (Wilopo, 2006). Tunggal (2010:231) menyatakan bahwa perusahaan yang melaksanakan pengendalian intern dalam perusahaan tentu akan membantu mereka dengan mudah mengecek kecurangan yang terjadi dan pada akhirnya akan mudah mendeteksi kecurangan secara dini. Faktanya beberapa tindakan kecurangan terjadi disebabkan oleh lemahnya sistem pengendalian intern kas. Kas merupakan salah satu modal kerja yang paling tinggi tingkat likuiditasnya. Semakin besar jumlah kas dalam perusahaan berarti semakin tinggi pula tingkat likuiditasnya.

Variabel ini dinyatakan berpengaruh signifikan negative terhadap kecurangan pada perusahaan BUMN. Hal ini disimpulkan bahwa semakin tinggi penerapan pengendalian intern kas, maka kecurangan akan semakin rendah dalam penelitian terdahulu yang dilakukan Husna (2013).

Hubungan Asimetri Informasi dengan *Fraud*

Asimetri informasi memberikan pengaruh terhadap

kecenderungan kecurangan akuntansi perusahaan, artinya semakin tinggi tingkat asimetri informasi pada perusahaan maka semakin tinggi pula tingkat terjadinya kecenderungan akuntansi pada perusahaan tersebut (Wilpo, 2006). Untuk meminimalisir terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi yang dilakukan oleh manajemen, maka pengendalian intern perusahaan juga harus ditingkatkan, apabila pengendalian intern sudah baik, maka kesempatan terjadinya asimetri informasi akan dapat diminimalisir yang akan bermuara pada penghentian tindakan kecurangan dalam perusahaan. Apabila sistem pengendalian intern lemah maka akan semakin tinggi tingkat terjadinya asimetri informasi dan semakin besar kesempatan manajemen untuk melakukan kecurangan yang memberikan keuntungan pribadi.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian terdahulu Zainal (2013) yang mengemukakan bahwa terdapat pengaruh positif Asimetri informasi terhadap *Fraud*.

METODE PENELITIAN

Objek penelitian ini adalah Badan Usaha Milik Negara di Kota Pekanbaru. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Badan Usaha Milik Negara di Kota Pekanbaru, yang berjumlah 33 BUMN. Adapun teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu sampel dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Sampel pada penelitian ini yaitu Kepala BUMN,

Kepala Bagian dan staf akuntansi. Sehingga responden keseluruhan berjumlah 99 orang

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner. Kuesioner berisi pernyataan data. pertanyaan yang harus diisi oleh responden yang menggunakan lima skala Likert. Sebagai berikut: 5= Sangat Setuju, 4= Setuju, 3= Kurang setuju, 2= Tidak Setuju, 1= Sangat Tidak Setuju. Kuesioner pada penelitian ditujukan kepada pejabat BUMN yang bekerja di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kota Pekanbaru.

Metode Analisis Data

Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi berganda. Model persamaan regresi dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e_1$$

Dimana:

$Y = \textit{Fraud}$

$\alpha = \text{Konstanta}$

$X_1 = \textit{Implementasi Good Corporate Governance}$

$X_2 = \textit{Pengendalian Intern Kas}$

$X_3 = \textit{Asimetri Informasi}$

$B_1 - \beta_2 = \text{Koefisien Regresi}$

$e = \textit{Error}$

Definisi Operasional Variabel

Fraud

Fraud adalah penipuan yang direncanakan misalnya salah saji, menyembunyikan atau tidak mengungkapkan fakta yang material sehingga merugikan pihak lain.

Implementasi Good Corporate Governance

Implementasi *good corporate governace* merupakan suatu sistem tata kelola perusahaan yang baik guna mengarahkan dan mengendalikan perusahaan untuk mencegah timbulnya kecurangan atau kesalahan dari pihak manajemen yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan.

Penerapan Pengendalian Intern Kas

Pengendalian intern kas merupakan suatu sistem yang dirancang oleh perusahaan agar tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh perusahaan dapat berjalan dengan baik, yaitu untuk mendapatkan laporan keuangan yang andal terutama pada kas dengan asset yang terjaga.

Asimetri Informasi

Asimetri informasi adalah situasi dimana terjadi ketidakselarasan informasi antara pihak yang memiliki atau menyediakan informasi dengan pihak yang membutuhkan informasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif variabel dan Metode analisis data dalam penelitian ini meliputi uji kualitas data (uji validitas dan uji reliabilitas), uji asumsi klasik (uji normalitas data, uji multikolinearilitas, heteroskedastisitas, uji autokorelasi), analisis statistik deskriptif, analisis regresi berganda, dan uji t untuk menguji tiap-tiap hipotesis.

Gambaran mengenai variabel-variabel penelitian yaitu Implementasi *Good Corporate*

Governance, Pengendalian Intern Kas, Asimetri Informasi sebagai variabel independen dan *Fraud* sebagai variabel dependen yang disajikan dalam tabel *descriptive statistics*. Tabel *descriptive statistics* menunjukkan angka minimum, maksimum, *mean*, dan standar deviasi dari penyebaran data hasil rekap kuisioner yang dapat dilihat pada tabel.

Tabel 1
Tabel Uji Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Y	66	19.00	46.00	36.5758	4.88659
X1	66	56.00	85.00	73.7727	6.24326
X2	66	69.00	93.00	82.6667	5.93123
X3	66	20.00	34.00	28.3333	3.45669
Valid N (listwise)	66				

Sumber: *Data Olahan, 2016*

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Uji validitas berguna untuk menguji keseluruhan instrumen pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel yang dianalisis. dalam penelitian ini setiap instrument dinyatakan valid, hal ini terlihat dari nilai r hitung seluruh indikator variabel lebih besar dari $r_{tabel} n 64, \alpha 5\% = 0,2042$. Dan didapat hasil bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini memenuhi kriteria dan dinyatakan valid yang diketahui dari besar nilai r hitung $> r$ tabel.

Uji Reliabilitas

Uji Reabilitas bertujuan untuk menguji konsisten jawaban responden atau seluruh butir pertanyaan yang digunakan. Teknik

statistik yang digunakan untuk pengujian tersebut adalah *cronbach's alpha* dengan bantuan SPSS for windows. Koefisien *cronbach's alpha* yang lebih dari nilai *rtable* disebut reliabel.

Tabel 2
Hasil Uji Reliabilitas Variabel

Variabel	Cronbach Alpha (α)	Kriteria	Kesimpulan
<i>Good Corporate Governance</i>	0,772	0,600	Reliabel
SPI Kas	0,775	0,600	Reliabel
Asimetri Informasi	0,709	0,600	Reliabel
Fraud	0,886	0,600	Reliabel

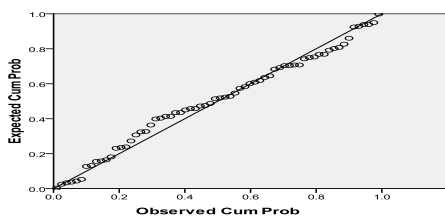
Sumber: Data Olahan, 2016

Berdasarkan hasil uji reliabilitas di atas dapat dijustifikasi bahwa keseluruhan instrumen pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel yang dianalisis dalam penelitian ini dinyatakan reliabel, hal ini terlihat dari nilai cronbach alpha seluruh variabel yang diteliti lebih besar dari 0,60.

Uji Normalitas

Uji normalitas berguna untuk menguji distribusi pada data penelitian ini apakah sudah normal atau belum. Berikut ini disajikan hasil uji normalitas pada grafik *Normal P-P Plot of regression standardized* dan uji *Kolmogorov-Smirnov*:

Gambar 1
Hasil Uji Normalitas Data



Sumber : Data Olahan, 2016

Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas dalam penelitian.

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(constant)		
GCG	0,231	4,329
SPI KAS	0,975	1,026
ASIMETRI INFORMASI	0,234	4,278

Sumber: Data Olahan, 2016

Hasil uji multikolinearitas, diperoleh bahwa untuk setiap variabel independennya memiliki nilai tolerance $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 . Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen tidak mengalami gangguan multikolinieritas.

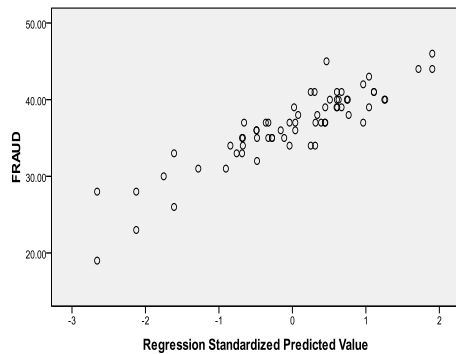
Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terdapat persamaan atau perbedaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Pengujian heterokedastisitas dilakukan dengan mengamati gambar *scatterplot*.

Berdasarkan gambar dari hasil uji heteroskedastisitas, terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini bebas dari heterokedastisitas.

Berikut disajikan hasil uji heteroskedastisitas dengan metode *scatterplot*:

Gambar 2
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: *Data Olahan, 2016*

Hasil uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya, jika ada berarti terdapat autokorelasi. Untuk melihat ada atau tidaknya gejala autokorelasi ini maka dapat dilakukan dengan menggunakan uji *Durbin-Waston* (DW test) pada tabel:

Tabel 4
Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the estimate	Durbin-Watson
1	0,903 ^a	0,815	0,806	2,150	1,805

Sumber: *Data Olahan, 2016*

Dari hasil uji *autokorelasi*, diperoleh angka DW sebesar 1,805, dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi dari penelitian ini bebas dari autokorelasi, karena angka DW berada diantara -2 sampai +2.

Hasil Uji Analisis Regresi Berganda

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi

untuk mengetahui keberadaan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan model *multiple regression* (regresi berganda) dengan menggunakan SPSS 20,00.

Tabel 5
Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	22.171	4.684		4.733	.000
1 X1	.474	.089	.606	5.344	.000
X2	.150	.046	.182	3.288	.002
X3	.402	.160	.284	2.519	.014

Sumber: *Data Olahan, 2016*

Berdasarkan hasil perhitungan, maka didapatkan persamaan regresi linier berganda :

$$Y = -22,171 + 0,474 X_1 + 0,150 X_2 + 0,402 X_3 + e$$

Hasil Pengujian Hipotesis

Hasil Pengujian Hipotesis Pertama

Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah untuk menguji apakah implementasi *good corporate governance* berpengaruh terhadap *fraud*. Diketahui t hitung (5,334) > t tabel (2) dan Sig. (0,000) < 0,05 dengan demikian **H₁ Diterima**. Dari hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa variable implementasi *good corporate governance* berpengaruh terhadap *fraud* pada BUMN kota Pekanbaru.

Hasil temuan penelitian ini sejalan dengan Penelitian ini menunjukkan hasil yang sama dengan Hasil penelitian Ratnayani (2014) menunjukkan bahwa implementasi

good corporate governance berpengaruh terhadap *fraud*. Penerapan *good corporate governance* berdampak pada fokusnya pengelolaan perusahaan dalam pembagian tugas, tanggung jawab dan pengawasan yang lebih jelas. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat implementasi *good corporate governance*, maka semakin rendah tingkat *fraud* pada BUMN Pekanbaru.

Hasil Pengujian Hipotesis Kedua

Hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah untuk menguji apakah penerapan pengendalian intern kas berpengaruh terhadap *fraud*. Dari hasil perhitungan SPSS 20.0 *for windows*, diperoleh nilai t hitung (3,288) > t tabel (2) dan Sig. (0,002) < 0,05 dengan demikian **H₂ Diterima**. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan pengendalian intern kas berpengaruh terhadap *fraud*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Semakin baik pengendalian intern kas yang dilaksanakan oleh perusahaan akan mempengaruhi efektifnya penganggaran dari perusahaan. Pengendalian intern kas di BUMN Kota Pekanbaru sudah baik karena para pegawai sudah memahami mengenai pengendalian intern kas dan resiko jika terjadi kecurangan terhadap kas yang dilakukan pegawai.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Husna (2013) menyimpulkan bahwa pengendalian intern kas berpengaruh signifikan terhadap kecurangan

Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga

Hipotesis ketiga yang diajukan

dalam penelitian ini adalah untuk menguji apakah asimetri informasi berpengaruh terhadap *fraud*. Dari hasil perhitungan SPSS 20.0 *for windows*, diperoleh nilai t hitung (2,519) > t tabel (2) dan Sig. (0,014) < 0,05. Dengan demikian tampak bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka **H₃ diterima**. Artinya, dengan adanya Asimetri informasi memberikan pengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi perusahaan, artinya semakin tinggi tingkat asimetri informasi pada perusahaan maka semakin tinggi pula tingkat terjadinya kecenderungan akuntansi pada perusahaan tersebut. adanya asimetri informasi memberikan kesempatan bagi manajemen untuk melakukan kecurangan, karena informasi yang disediakan oleh pihak manajemen tidak selaras dengan informasi yang dibutuhkan, hal tersebut membuat manajemen memanfaatkan keadaan dengan cara melakukan salah saji laporan keuangan sehingga dapat memperbaiki reputasi manajemen yang nantinya akan memberikan keuntungan bagi dirinya sendiri, hal ini akan semakin besar peluang kecurangan apabila manajemen atau perusahaan tidak memiliki sistem pengendalian intern yang efektif yang berguna mengetahui asimetri informasi.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian terdahulu Zainal (2013) yang mengemukakan bahwa asimetri informasi berpengaruh terhadap *fraud*.

Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R²)

Berdasarkan hasil yang diperoleh, menunjukkan bahwa nilai

Adjusted R *square* sebesar 0,806 yang menunjukkan bahwa *fraud* yang ada pada BUMN Kota Pekanbaru dipengaruhi oleh variabel Implementasi *Good Corporate Governance*, Pengendalian Intern Kas, Asimetri Informasi sebesar 80,6% dan sisanya 19,4% di pengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Seperti variabel Budaya Organisasi, Kompetensi Pegawai dan lain-lain.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di bahas pada BAB sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pengujian hipotesis pertama dapat diketahui bahwa implementasi *good corporate governance* berpengaruh terhadap *fraud* pada perusahaan BUMN di Pekanbaru. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat implementasi *Good Corporate Governance* perusahaan BUMN maka semakin rendah akan terjadinya *Fraud* di perusahaan BUMN di kota Pekanbaru.
- 2) Pengujian hipotesis kedua dapat diketahui bahwa pengendalian intern kas berpengaruh terhadap *fraud* pada perusahaan BUMN di kota Pekanbaru. Semakin besar jumlah kas dalam perusahaan berarti semakin tinggi pula tingkat likuiditasnya semakin tinggi tingkat penerapan pengendalian intern kas di perusahaan BUMN maka semakin rendah akan terjadinya *fraud* di perusahaan BUMN di kota Pekanbaru.
- 3) Pengujian hipotesis ketiga dapat diketahui bahwa asimetri

informasi berpengaruh terhadap *fraud*. Asimetri informasi memberikan pengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi perusahaan, artinya semakin tinggi tingkat asimetri informasi pada perusahaan BUMN maka semakin tinggi pula tingkat terjadinya kecenderungan akuntansi pada perusahaan BUMN di kota Pekanbaru.

- 4) Hasil penelitian diperoleh nilai koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 0,806. Hal ini berarti 80,6 %. Variasi dari kecurangan bisa dijelaskan oleh variasi variabel independen (implementasi *Good Corporate Governance*, pengendalian intern kas dan asimetri informasi). Sedangkan sisanya 19,4 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini seperti variabel budaya organisasi dan kompetensi pegawai.

Saran

Memperhatikan adanya beberapa keterbatasan seperti yang telah disampaikan dalam penelitian ini, maka bagi penelitian selanjutnya perlu memperhatikan beberapa saran berikut ini:

- 1) Diharapkan kepada segenap jajaran BUMN memperhatikan implementasi *good corporate governance*, pengendalian intern kas dan asimetri informasi yang mempengaruhi *fraud*.
- 2) Diharapkan kepada peneliti selanjutnya menambah variabel independen lain yang mempengaruhi *fraud* seperti motivasi, kompetensi aparatur dan budaya organisasi.

- 3) Diharapkan kepada peneliti selanjutnya dapat memperluas area survey penelitian, tidak hanya wilayah pekanbaru tetapi wilayah sumatera lainnya dan juga memperluas objek penelitian, tidak hanya BUMN, tetapi di perusahaan swasta, BUMD dan SKPD .
- 4) Diharapkan kepada peneliti selanjutnya dapat melakukan metode wawancara langsung pada masing-masing responden dalam upaya mengumpulkan data jika memungkinkan, sehingga dapat menghindari kemungkinan responden tidak objektif dalam mengisi kuisioner.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmawati, A. 2004. Determinan Kecurangan Laporan Keuangan: Pengujian Teori Fraud Triangle. Skripsi. fakultas Ekonomika dan Bisnis. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Deni Darmawati. 2006. Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Faktor Regulasi terhadap Kualitas *Implementasi Corporate Governance*. Makalah disajikan pada Simposium Nasional Akuntansi IX, Padang 23-26 Agustus 2006
- Herman, Lisa Amalia. 2013. Pengaruh Keadilan Organisasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kecurangan (Studi Empiris Pada Kantor Cabang Utama Bank Pemerintah Di Kota Padang). Artikel Ilmiah, 1 (1) Padang.
- Husna, Fitriatil. (2013). Pengaruh Penerapan Pengendalian Intern Kas dan Implementasi Good Corporate Governance Terhadap Kecurangan (Studi Empiris Pada Perusahaan BUMN di Kota Padang). Artikel Ilmiah, 1 (2) Padang.
- Rahmawati, dkk. 2006. “Pengaruh Asimetri Informasi terhadap Praktik Manajemen Laba pada Perusahaan Perbankan Publik yang terdaftar Di Bursa Efek Jakarta”. Simposium Nasional Akuntansi IX., Padang
- Ratnayani, Putu Ayu, Pengaruh Pengendalian Intern Kas Dan Implementasi Good Governance Terhadap Fraud (Studi Empiris pada SKPD di Kabupaten Buleleng), Universitas Pendidikan Ganesha, Jurnal Vol: 2 No:1 Tahun 2014.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Saputra, Gede Krisna, 2015, Pengaruh Penerapan Pengendalian Intern Kas, Implementasi Good Governance dan Moralitas Individu terhadap Kecurangan (*Fraud*). Universitas Pendidikan

- Ganeshha, Jurnal Vol: 3 No: 1 Tahun 2015.
- Setiawan, 2015, Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Asimetri Informasi, dan Keadilan Organisasi terhadap Kecurangan (Fraud) (Studi Empiris pada Bank Perkreditan Rakyat Se-Kabupaten Buleleng), Jurnal Vol. 2 Tahun 2015
- Syair, Abdul. 2009. *Implementasi Good Corporate Governance* Pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tenggara. (Online) (<http://syair79.wordpress.com/2009/06/10/implementasi-good-corporategovernance-pada-bank-pembangunan-daerah-bpd-sulawesi-tenggara/>), diakses pada tanggal 6 Mei 2014.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- Wilopo. 2006. Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Studi Pada Perusahaan Publik dan Perusahaan Badan Usaha Milik Negara. Simposium Nasional Akuntansi 9, Padang.
- Zainal, Rizki. 2013. Pengaruh Efektivitas Pengendalian Intern, Asimetri Informasi, dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Fraud) (Studi Empiris Kantor Cabang Bank Pemerintah dan Swasta Di Kota Padang). Jurnal UNP: Padang.